

**KEDUDUKAN STRUKTUR DESA DALAM RANGKA MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

(Studi Desa Bontotangnga Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Akbar Rahman

NIM: 10500112043

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, 29 Juni 2016

Penyusun

AKBAR RAHMAN
NIM : 10500112043



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Kedudukan Struktur Desa Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Studi Desa Bontotangnga Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa)”, yang disusun oleh Akbar Rahman, NIM 10500112043, Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari rabu, 29 juni 2016 M, bertepatan dengan 24 Ramadhan 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum .

Gowa, 29 juni 2016 M.
24 Ramadhan 1437 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Istiqamah, S.H.,M.H. (.....)

Munaqisy I : Rahman Syamsuddi, S.H., M.H. (.....)

Munaqisy II : Erlina, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Jumadi, S.H.,M.H. (.....)

Pembimbing II: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan judul : ***“Kedudukan Struktur Desa Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”***. Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penyusun jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Rampungnya karya tulis ini penyusun persembahkan untuk Ibundaku tercinta, ***Hj. Marhaban HS*** dan Ayahanda ***H. Abd. Rahman HS*** atas doa, dukungan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tiada hentinya, yang akan mengantarkan penyusun pada kesuksesan. Semua kesuksesan yang telah kuraih dan insya Allah akan kuraih kupersembahkan untuk kalian. Kehadiran karya tulis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materiil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penyusun, melalui pengantar skripsi ini secara khusus penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada ***Bapak Dr. Jumadi, SH., MH dan Bapak Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag*** yang senantiasa, meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun hingga rampungnya penyusunan skripsi ini. Dari lubuk hati penyusun yang paling dalam dikhaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ***Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si*** atas segala perhatian yang diberikan kepada penyusun selama

menjadi mahasiswa pada almamater Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag** dan para Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Para Dosen Penguji **Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH** dan **Ibu Elina, SH., MH**, atas semua masukan ilmu yang berharga untuk penyusun.
4. Segenap *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak berjasa mendidik penyusun sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak **Amiruddin Rate** selaku Kepala Desa dan **kakak Harmin** selaku Sekretaris Desa Bontotangga Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa .
7. Saudara-saudariku tercinta, **Hj. Aisayah Rahman, Alm. Asmar Rahman, Alm. Ahmar Rahman, Anwar Rahman, Anhar Rahman S.Hi**, dan **Apsa Rahman S.Ei**.
8. Sahabat-sahabatku tercinta, **Aswan Sakti, Erwin Karim, Ari Suedar, Anugrah Nur Jihat (ANTEBAS)**.

9. Kelurga besar ***Racana Alauddin dan Maipadeapati*** UIN Alauddin Makassar.
10. ***Bapak dan Ibu kost*** Pondok Berkah Samata.
11. Sahabatku ***Irwan*** yang telah siap membantu penelitian Skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar ***Pondok Berkah*** yang telah menjadi tempat kediaman selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
13. Segenap keluarga besar mahasiswa ***Jurusan Ilmu Hukum*** Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Teman-teman ***KKN Angkatan 51*** Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
15. Teman-teman ***Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya***
16. Adinda ***Marhayana*** yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini.

Dengan segala keterbatasan, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati tegur sapa yang konstruktif penyusun sambut demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga kehadiran skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian ilmu hukum perdata.

Akhir kata ***Alhamdulillah Rabbil Alamin.***

Gowa, 29 juni 2016

Penyusun

Akbar Rahman

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11-30
A. Tinjauan Historis, Filosofis, Yuridis dan Sosiologis mengenai Desa	11
B. Desa menurut konsep Undang-Undang	28
C. Kerangka Konseptual Desa.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31-36
A. Jenis dan Lokasi penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrument Penelitian	35
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	35

	G. Pengujian Keabsahan Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37-64
	A. Struktur Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	37
	B. Kesiapan Aparat Desa Bontotangnga dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	61
BAB V	PENUTUP.....	65-65
	A. Kesimpulan	65
	B. Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

Nama : Akbar Rahman

NIM : 10500112043

**Judul : Kedudukan Struktur Desa Dalam Rangka Mempercepat
Pembangunan Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa**

Struktur desa adalah susunan organisasi yang mengatur jalannya pemerintahan desa. Sebagai organ Negara, aparat desa mempunyai fungsi diantaranya mempercepat pembangunan untuk mencapai cita – cita bersama yakni kesejahteraan dan kemakmuran warga desa. Setelah diterapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah langkah jitu pemerintah yang memberikan amanah besar untuk aparat desa mengatur dan mengawasi anggaran dalam penerapannya Desa Bontotangnga mendapatkan lebih 1 milyar rupiah.

Struktur desa yang berubah pada Undang – Undang baru ini yakni pada sekretaris dan adanya penambahan yakni tiga kepala seksi yang membuat penghambat disini adalah berbicara gaji ketiga kepala seksi tersebut yang pada penjelasan kepala desa belum mempunyai anggaran tersendiri di APBN dan APBD. Keuangan merupakan hal yang sangat memberikan ketidak pahaman kepala desa karena setiap bulannya format laporan pertanggung jawaban kegiatan yang berbeda dan berubah – ubah ini yang membuat kepala desa dan anggotanya kebingung dalam pelaporan keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang – undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia . Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia , yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats fundamental norm). Artinya UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam pembuatannya tidak boleh beretentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Sebab sUUD 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila (walaupun tidak tertera secara langsung dalam UU). Maka dari itu, dikenal lah sebuah asas yang berbunyi lex superior derogat legi inferior, artinya, hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah.

UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat sattis/absolut. UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 37. Dalam perubahannya ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi asas lex superior derogat legi inferior. Sampai saat tulisan ini ditulis, UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen.

Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam me-

nyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana.

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan mengenai Pengaturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamaanya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system keatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
5. Membentuk Pemerintahan desa yang Profesional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagian dari ketahanan soioal
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi Kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan ¹

Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan di Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Jimly Asshiddiqie. Gagasan konstitusi sosial (jakarta: LP3ES,2015)h 353

Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan desa, apabila memperhatikan secara cermat teks hukum UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang desa berikut ini. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Dasar yang digunakan adalah berdasarkan

- (1) prakarsa masyarakat,
- (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional.

Pertanyaan siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pertanyaan ini dijawab dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Didalam QS. An-nisa 4/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﷺ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.

Didalam ayat diatas menegaskan bahwa kita harus menaati para pemimpin diantara kita termasuk Kepala Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Ayat lain yang terkait Pemerintahan adalah:

Al-qur'an surat An-nur ayat 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﷻ

Terjemahnya :

dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal – amal saleh, bahwa Dia sungguh – sungguh

akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang –orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai-Nya untuk mereka, Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik .

Dalam ayat ini jelas terlihat bahwa Allah Swt. Menjanjikan kekuasaan kepada hambanya yang beriman sebagai khalifa atau pemimpin diantara mereka.

Dalam uraian latar belakang diatas. Fenomena hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Kedudukan Struktur Desa Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bontotangnga Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa .**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah pada penerapan dan pelaksanaan struktur desa dalam percepatan pembangunan desa menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat desa sebagai amanat UUD 1945 PASAL 33.

Dan berdasarkan dari Latar Belakang diatas maka penulis mengambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Struktur Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014

2. Kesiapan Aparat Desa Bontotangnga dalam menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami fokus penelitian kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan namun dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan struktur adalah susunan organisasi yang teratur dan tugas masing – masing.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Struktur Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. .Bagaimanakah Kesiapan Aparat Desa menerapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

D. Kajian Pustaka

1. Struktur Desa

Istilah struktur desa tidak asing lagi ditelinga kita oleh karena itu pada dasarnya struktur desa sangat penting dalam pemerintahan untuk terciptanya pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan³ namun dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan struktur adalah susunan organisasi yang teratur dan tugas masing – masing

Sedangkan desa menurut kamus besar bahasa indonesia desa adalah wilayah terkecil yang dihuni oleh penduduk yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (bagian dari kecamatan); wilayah pemerintahan yang terkecil dan dipimpin oleh seorang kepala desa.⁴

2. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Negara kesatuan adalah Negara dengan kedudukan tertinggi yang dipegang oleh pemerintah pusat dan memiliki kekuasaan diantara kekuasaan tersebut pelimpahan wewenang kepada daerah.⁵

Terkhusus pada Undang – Undang ini

Undang – undang No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan aturan yang secara khusus mengatur persolan desa dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kesejahteraan desa terutama struktur desa.

³ Ahmad A.K. Muda kamus lengkap bahasa indonesia(Reality Publisher) h 505

⁴ Ahmad A.K. Muda kamus lengkap bahasa indonesia(Reality Publisher) h 181

⁵ Seta basri, Pengantar ilmu politik(Jogjakarta:indie book corner,2011)h 43

Konsep struktur desa menurut undang ini adalah Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis.*⁶

Selanjutnya pemerintah desa dibantu oleh sekretaris desa dan kepala dusun untuk mengoktimalkan pelayanan agar tercapainya cita – cita bersama⁷. Seperti halnya tujuan Negara yakni menyelenggarakan kesejatraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.⁸

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran terhadap struktur desa sebelum berlakunya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang struktur desa. dan Melihat kesiapan masyarakat desa terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwajib didalamnya,

Disamping itu setelah diadakan pengkajian dan penulisan ini, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan intelektual, sekaligus dapat menambah informasi positif terhadap masyarakat, khususnya masyarakat desa tentang undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

⁶Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa

⁷ Prajudi Atmosudirjo(Ghalia Indonesia,1995)h 17

⁸ Soehino , ilmu Negara(Yogyakarta:liberty Yogyakarta 1998)h148

1. Untuk mengetahui perundang – undangan tentang struktur menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk mengetahui kesiapan aparat desa menerapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

Sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pengamat literatur-literatur struktur daerah, agar dapat melihat sisi-sisi baiknya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari, berbangsa dan bernegara.

Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca, dan sebagai masukan kepada para aparat Desa Bontotangnga Kecamatan Botolempangan Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (value) yang berlaku disuatu masyarakat. dapat dikaitkan hukum itu merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Jadi fungsi hukum adalah sarana pembaruan masyarakat sebagai mana konsep ilmu hukum yang bersumber pada teori “ *law as a tool of social engineering* ” .¹

A. Tinjauan Historis, Filosofis, Yuridis dan Sosiologis mengenai Desa²

1. Historis

Pertama, desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat – istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self- governing community.

¹ Abdul manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (jakarta kencana prenada media) h 21

² Naskah akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa colonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*selfgoverning community*).

Desa – desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Trias politica yang diterapkan dalam negara-bangsa modern juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan desa. Desa-desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (rembug Desa) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).

Kedua, secara historis, semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada beberapa aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial, dan seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan

keberlanjutan hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.

2. Filosofis

Pertama, Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua, mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata Negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia. Artinya bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa, maka pengaturan desa dalam Undang-Undang adalah sangat mendesak karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini akan menentukan luasnya jangkauan pengaturan mengenai desa. Artinya pengaturan dalam Undang-Undang ini akan menentukan pula maju mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya. Otonomi dan demokrasi desa yang akan dibingkai dengan undang-undang tentang desa bukan sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan mempunyai dasar filosofis yang dalam. Kita membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh negara (pemerintah) yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis.

Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui (beyond) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” pusat. Kemandirian Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan NKRI dan imajinasi Indonesia itu. Jika desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Ketiga, UU tentang pemerintahan desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Apa maknanya?

Pertama, kemandirian desa bukanlah kesendirian Desa dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian desa tentu tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi

lokal bagi kemandirian desa. Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang yang memungkinkan (enabling) untuk tumbuh. Regulasi yang mengandung banyak instruksi dan intervensi tentu akan menumpulkan inisiatif lokal. Karena itu kemandirian desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan respons kebijakan. Dari atas dibutuhkan pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas desa dan termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada desa. Kewenangan memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat perencanaan lokal. Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa.

Kemandirian itu sama dengan otonomi desa. Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI.
- Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
- Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;

- Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat.
- Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Kedua, demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi, yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di desa, maka akan muncul “penguasa tunggal” yang otokratis, serta kebijakan dan keuangan desa akan berjalan apa adanya secara rutin, atau bisa terjadi kasus-kasus bermasalah yang merugikan rakyat desa. Demokrasi desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi.

Demokrasi juga menjadi arena untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu, mandiri, militan dan mempunyai kesadaran tentang pengelolaan barang-barang publik yang mempengaruhi hidup mereka. Pendidikan dan pembelajaran ini penting, mengingat masyarakat cenderung pragmatis secara ekonomi dan konservatif secara politik, akibat dari perkembangan zaman yang mengutamakan orientasi material.

Ketiga, isu kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi Desa yang berbasis pada potensi lokal. Kemandirian dan demokrasi desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat desa.

Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya kepada desa, dan demokrasi memungkinkan pengelolaan sumberdaya desa berpihak pada rakyat desa. Hak Desa untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya, merupakan modal yang sangat berharga bagi ekonomi rakyat Desa. Demikian juga dengan alokasi dana Desa yang lebih besar akan sangat bermanfaat untuk menopang fungsi Desa dalam penyediaan layanan dasar warga desa. Namun, kesejahteraan rakyat desa yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu dicakup oleh pemerintah desa semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipatif, yang berorientasi pada perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.

3. Yuridis

Pertama, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 18 b adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan ”....., maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri...” Hal ini berarti bahwa desa sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu, usulan mengenai pentingnya Undang-undang mengenai desa ini dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasuk pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil Forum Pengembangan yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil’. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, atau setidaknya undang-undang juga harus

memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dan desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri (Yando Zakaria, 2002).

Kedua, pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa dalam konstitusi sebenarnya nampak jelas (Yando Zakaria, 2002). Dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kalimat ini menegaskan bahwa NKRI harus mengakui keberadaan Desa-Desa di Indonesia yang bersifat beragam. Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan Desa otonom (*local self government*) atau disebut Desa Praja yang kemudian dikenal dalam UU No. 19/1965, yakni Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landchappen* akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan *volksgetneenschappen* akan mengikuti azas rekognisi/pengakuan (meski azas ini tidak dikenal dalam semesta teori desentralisasi).

Namun keragaman dan perbedaan *zelfbesturende landchappen* (Desa otonom) dan *volksgetneenschappen* (Desa adat) itu lama kelamaan menghilang, apalagi di zaman Orde Baru UU No. 5/1979 melakukan penyeragaman dengan model Desa

administratif, yang bukan desa otonom dan bukan desa adat. Lebih memprihatinkan lagi, UUD 1945 Amandemen Kedua malah menghilangkan istilah desa. Pasal 18 ayat 1 menegaskan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Juga pasal 18B ayat 2 menegaskan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Meskipun istilah desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 telah Forum memberikan pengakuan itu dan secara nasional melakukan penyebutan desa (atau dengan nama lainnya). Pengakuan diberikan kepada eksistensi desa (atau nama lain) beserta hak-hak tradisionalnya hak asal-usul. Kebijakan yang sama juga terlihat misalnya dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui kembali keberadaan mukim (berada di tengah kecamatan dan Desa/gampong), yang selama

Orde Baru mukim dihilangkan dari struktur hirarkhis dan hanya menempatkan gampong sebagai desa.

Ketiga, penyerahan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota kepada desa sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Karena itu jika UU Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas amanat dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi desa.

4. Sosiologis

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada desa.

Kedua, ide dan pengaturan otonomi desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik desa. “Otonomi Desa” hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat desa, dan secara

sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari interupsi Negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Ketiga, pengaturan tentang otonomi desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah Daerah dan desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah survival ability bangsa.

Otonomi desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat kalau dalam otonomi daerah atau desa justru melemahkan bangunan NKRI atau survival ability bangsa. Ini mungkin terjadi kalau tidak ada pengaturan tepat antara peran negara, daerah dan desa. Perlu diingat bahwa negara tidaklah

sekedar agregasi daerah-daerah atau desa-desa yang otonom. Spirit desa bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang memperkuat negara-bangsa.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Tepatnya, Rabu 18 desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi UU Desa. Kemudian pada 15 januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani guna mengesahkan UU tersebut.

Adapun tujuan dari disahkannya UU Desa ini antara lain:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

¹ Naskah akademik Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 Tentang Desa

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan asas pengaturan dalam UU Desa ini adalah:

1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

4. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
5. kegotong royongan, yaitu kebiasaan saling tolong – menolong untuk membangun desa ;
6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Penetapan UU Desa ini tak lepas dari penolakan. Di samping, ribuan kepala desa di seluruh Indonesia menyambut dengan gegap gempita dan penuh dengan sukacita, daerah Sumatera Barat menolak UU tersebut. Hal tersebut dikarenakan, menurut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) se-Sumatera

Barat, beranggapan bahwa UU Desa akan melemahkan eksistensi nagari di Sumbar sebagai satu kesatuan adat, budaya dan sosial ekonomi.

Terlepas dari penolakan dari LKAAM Sumbar, UU ini secara umum mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, UU ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan Undang-Undang Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa. Selain itu, poin-poin lain yang disepakati adalah terkait masa jabatan kepala desa. Kemudian diatur juga terkait kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Baik kepala desa, maupun perangkat desa mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan mendapat jaminan kesehatan.

Di sisi lain, UU Desa juga mengandung kekurangan. Kekurangan pertama, adanya perbedaan pengertian desa adat menurut UU Desa dengan pengertian desa

adat menurut masyarakat desa adat itu sendiri. Kekurangan kedua, tereletak pada dana alokasi kepada setiap desa per tahun yang dapat saja disalah gunakan. Kemudian, tidak menjelaskan secara khusus tentang penempatan perempuan minimal 30 persen pada perangkat desa. Selain itu, tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan-tujuan yang hendak dicapai setelah pengesahan UU Desa².

B. Desa Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Di jelaskan pengertian desa yakni dalam

Pasal 1(ayat 1)

*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*³

Pada dasar berdasarkan uraian pengertian desa yang dijelaskan dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tak terlepas dari hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

² Ridhoni muhammad “Analisis penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” <http://edhoniedo.blogspot.co.id/2015/09/analisa-penerapan-undang-undang-nomor-6.html> (30 Nopember)

³ Republik indonesia undang-undang nomor 6 tahun 2014 .bab 1,pasal 1 (ayat 1)

Konsep Masyarakat

Ada banyak konsep masyarakat di Indonesia, akan tetapi konsep masyarakat desa bontotangnga kecamatan botolempangan kabupaten gowa adalah

*“ tipe masyarakat konsensus. Umumnya tipe masyarakat konsensus dianut pendapat bahwa meski terdapat kehadiran kelas dan kelompok yang berbeda serta konflik – konflik kepentingan namun suatu kesatuan dan keharmonisan tertentu tetap eksis didalam masyarakat dan, yang menjadi dasar masyarakat adalah kerja sama, konsensus, commod good, perdamaian, perubahan, dan keseimbangan sosial.”*⁴

Masyarakat yang berkonsep Konsensus berpandangan bahwa hukum berfungsi sebagai melayani kepentingan luas beserta berbagai fungsi didalam masyarakat disamping itu konsep ini pula memandang hukum bekerja sebagai mekanisme integritas yang berperan untuk mendukung dan mengembangkan integritas sosial.

*“ Menurut Emile Durkheim memandang masyarakat adalah perpaduan dan konsensus, bagi Durkheim masyarakat merupakan suatu fenomena moral, serta tidak lebih dari pada suatu lingkungan moral yang mengelilingi individu. fungsi hukum menurut Durkheim adalah menjamin, mempertahankan, serta meningkatkan solidaritas sosial.”*⁵

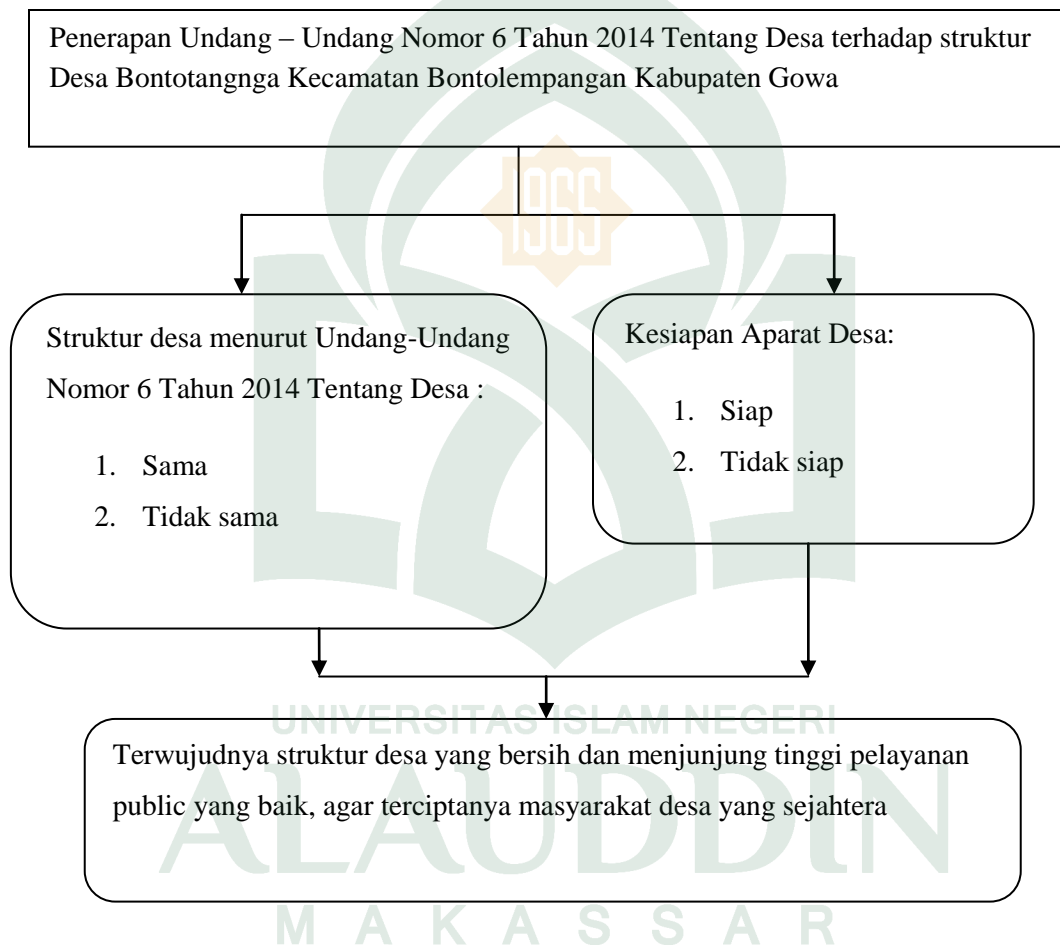
Dengan konsep masyarakat seperti ini memudahkan pemerintah untuk mengaplikasikan aturan secara baik dan konsep ini pula mengurangi konflik sosial

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum* (Jakarta: kencana prenada media group 2012) h.106

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum* h.114

diantara masyarakat,disatu sisi aturan itu tidak diterapkan karna adanya ketidak seimbangan dikalangan masyarakat.

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal¹ dan Sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bontotangnga Kecamatan Botolempangan Kabupaten Gowa. Kaitannya dengan penerapan Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa terhadap struktur desa.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan desa bontotngnga adalah pemekaran dari Desa Bontoloe yang mendengar dari pemaparan awal masyarakat desa disaat pemilihan pertama desa ini mengalami kekacauan baik dari keamana maupun struktur desa .sehingga peneliti menganggap menarik untuk diteliti mengenai struktur desa sesuai Undang – Undang .

¹ Amiruddin dan zaenal Azikin, pengantar metode penelitian hukum,(Jakarta:grafindo Persad,2003)h 118

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian pustakawan atau studi dokumen disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperputakaan². Serta pendekatan sosiologis maksudnya pendekatan ini melihat dan mengamati penerapan aturan dan pengaruhnya terhadap struktur Desa Bontotangnga.

Pendekatan penelitian lain, yang digunakan peneliti sebagai berikut

Populasi pada umumnya berarti keseluruhan obyek penelitian, maka mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian³ atau semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.⁴

Adapun sampel adalah sebahagian dari populasi. Sampel ditetapkan untuk menjadi wakil dari populasi yang diteliti. Sugiyono menyebutkan bahwa sampel

² Bambang Waluyo *peneliti hukum dalam praktek* (jakarta .sinar grafika .2008)h.13

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet XI; Jakarta: Bumi Aksara, 1993),h.144.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h.53.

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Ali bahwa sampel adalah dalam melaksanakan penelitian adakalanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan objek yang diteliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.⁶

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah perwakilan dari sejumlah populasi yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah pengurus desa terutama kepala desa dan masyarakat Desa Bontotangnga Kecamatan Botolempangan Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder data yang bersumber dari perundang – undangan atau bahan hukum lain, baik hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier dan alat pengumpul data berupa studi dokumen

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini merupakan sebagai berikut:

1. Data primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang – undangan dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2006), h.55.

⁶ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan prosedur dan Strategi*, (Bandung: PT Aksara, 1985), h.54.

2. Data sekunder antara lain berupa tulisan dari pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur – literatur yang berupa buku ,jurnal, makalah, dan hasil penelitian
3. Data tersier,antara lain berupa bahan – bahan yang bersifat menunjang banah hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi ⁷bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan informasi atas pengamatan dan pengalaman dalam menganalisis penerapan aturan hukum

b. Studi dokumentasi

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau data yang sudah

⁷ Misri Singarimbun dan Sofian Effendi,metode penelitian survai(Jakarta:pustaka LP3ES Indonesia 2006)h192

berbentuk jadu seperti dokumen dan publikasi ⁸serta menelaah buku – buku , tulisan – tulisan yang berhubungan dengan analisis penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, dokumen, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan mengali data dari sumber – sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai berikut :

- a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan , mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan dan uraian umum.

⁸ Rianto Adi metodologi penelitian sosial dan hukum (jakarta Granit 2010)h57

- b) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan
- c) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit – bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan,

Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.¹

Kecamatan Bontolempangan merupakan daerah pegunungan/lereng yang berbatasan Sebelah Utara Kecamatan Bungaya dan Kecamatan Parigi, Sebelah Selatan Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Biringbulu, Sebelah Barat Kecamatan Bungaya dan Kecamatan Parigi di Sebelah Timur Kecamatan Tompobulu. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8 (Delapan) desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Bontolempangan adalah Paranglompoa dengan jarak sekitar 63 km dari Sungguminasa. Jumlah penduduk Kecamatan Bontolempangan sebesar 13.690 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar

¹ <http://suaragowa.blogspot.co.id/2011/04/kabupaten-gowa-kondisi-geografis-dan.html> (25-12-2015)

6.571 jiwa dan perempuan sebesar 7.119 jiwa dan sekitar 99.15 persen beragama Islam. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Bontolempangan seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 6 buah, Sekolah dasar negeri 3 buah, Sekolah dasar Inpres 9 buah, Sekolah lanjutan Tingkat pertama 5 buah, sekolah lanjutan atas 2 buah, Madrasah Ibtidaiyah 4 buah, Madrasah tsanawiah 3 buah, madrasah Aliyah 2 buah. Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, tempat ibadah (Masjid) Penduduk Kecamatan Bontolempangan umumnya berprofesi sebagai petani utamanya petani padi/palawija dan perkebunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah mencapai 100 persen.

Desa Bontotngnga merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Bontolempangan kabupaten Gowa propinsi Sulawesi Selatan. Desa Bontotangnga dipimpin oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Desa Bontotangnga terbagi dalam 3 Dusun yaitu : dusun Bontomarannu, dusun Ompoa dan dusun Bontokura. Kepala desa dipilih secara demokrasi dalam satu kali masa periode kepengurusan. Sebagai kesatuan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia desa Bontotangngaberada dibawah garis koordinasi kecamatan dan struktur kekuasaan yang lebih tinggi diatasnya. dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan secara demokratis, transparan akuntabilitas sesuai dengan amanat undang-undang.

Berikut secara detail Desa Bontotangnga:

1. Batas Desa

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) sebelah utara | : Desa Bontoloe | : Kec. Bontolempangan |
| b) sebelah selatan | : Desa Bontolempangan | : Kec. Bontolempangan |
| c) sebelah timur | : Desa Rappoala | : Kec. Tompo Bulu |
| d) sebelah barat | : Desa Lassa-lassa | : Kec. Bontolempangan |

2. Luas desa Bontosunggu 540,77 ha/m².

3. Jumlah penduduk desa Bontosunggu 6527 jiwa.

4. jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 69 km.

5. jarak dari kota kecamatan 15 km.

6. Kondisi sosial, Politik dan Budaya

1. Kondisi Sosial

Mayoritas masyarakat di desa bontotangnga beragama Islam dengan latar belakang ormas islam yang berbeda. Masyarakat desa Bontotangnga mayoritas sebagai petani dalam mencari nafkah sehingga masyarakat desa Bontotangnga dalam starata Ekonomi masih tergolong dalam kelas menengah kebawah. Dalam hal kemajuan dan peradaban masyarakat desa Bontotangnga sudah ada perubahan kerah yang lebih baik sehingga peka dalam menghadapi kondisi sosial dan tingkat harmonisasi masyarakat masih saling terjaga.

2. Kondisi Politik

Dalam hal perpolitikan masyarakat desa Bontotangnga kurang mengalami kemajuan dalam hal partisipasi politik, sehingga masyarakat Bontotangnga tergolong

dalam masyarakat yang sedikit pasif dalam berpolitik. Dinamika politik di desa Bontotangnga masih bisa dinormalisasi sehingga konflik horizontal jarang terjadi dalam aktifitas politik.

3. Kondisi Budaya

Pada era Posmodernisme sekarang arus globalisasi tidak bisa dibendung lagi dalam mempengaruhi kehidupan dari semua dimensi, sehingga pola dan tingkah laku masyarakat dibentuk kembali dengan kerangka modern yang mitosnya sebagai zaman yang penuh dengan kemajuan. Pada zaman modern juga masyarakat kehilangan identitas diri yang telah ternaman dari nenek moyang sesuai dengan karakter suatu bangsa. Dalam hal ini masyarakat Bontotangnga sudah mengalami penurunan untuk mengkonsumsi budaya asal makassar namun justru terjebak pada perangkat globalisasi yang menjurus pada westernisasi (kebarat baratan)²

b. Struktur desa menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014

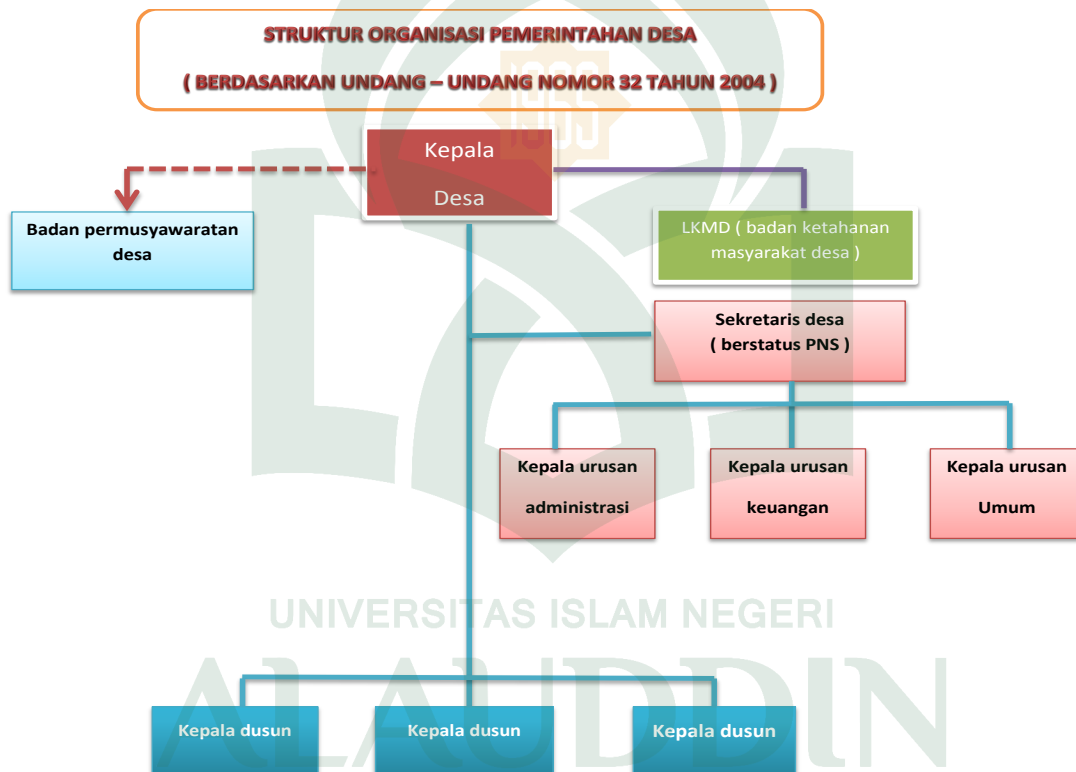
Reformasi birokrasi merupakan kata yang tepat dalam menanggapi hal yang diatas sebab syarat penting untuk menganalisis bidang kelembagaan karena lebih dari sekedar aturan baku seperti TAP MPR, Undang – Undang dan seterusnya yang mengatur organisasi, maka suatu strategi dinamis kelembagaan pemerintah yang jitu merupakan kebutuhan sangat penting dan harus terus menerus dilaksanakan agar semakin hari semakin baik.³ Undang – undang nomor 6 tahun 2014 merupakan langkah jitu yang dilakukan DPR RI dan semua pihak yang memberikan sumbangsih

² Badan pusat statistik kabupaten gowa tahun 2013

³ Faisal Tamin Reformasi Birokrasi (jakarta balantika 2004)h 104

dalam mencetus dan menetapkan Undang – Undang tersebut yang pada hakikatnya memberikan tanggung jawab besar pemerintah desa dan mengsejahterakan masyarakat desa .

Sebelum Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 diterapkan struktur Desa Bontotangnga Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa



Gambar 1. Sturktur desa menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004⁴

⁴ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tugas dan peran aparat Desa

KEPALA DESA

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada saat menjalankan tugas Kepala Desa sebaiknya harus mengikuti syariat islam amanah dan adil dalm mengambil sebuah keputusan sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

1. memelihara kerukunan hidup warga masyarakat
2. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa
3. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
4. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
5. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat

6. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. menanamkan dan memupuk rasa perasatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, pemerintah Kabupaten Boyolali dan Negara Kesatuan republik Indonesia.
3. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
6. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. memberdayakan hak politik masyarakat desa
8. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat
9. mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial yang timbul masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Pemerintah Desa, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
4. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD.

Hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat Kewajiban
3. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
6. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7. Memproses pemilihan kepala desa
8. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

SEKRETARIS DESA

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KAUR ADMINISTRASI

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

- Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.

KAUR KEUANGAN

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

KEPALA URUSAN (KAUR) UMUM

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - Pengelolaan administrasi perangkat Desa

- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

KEPALA DUSUN

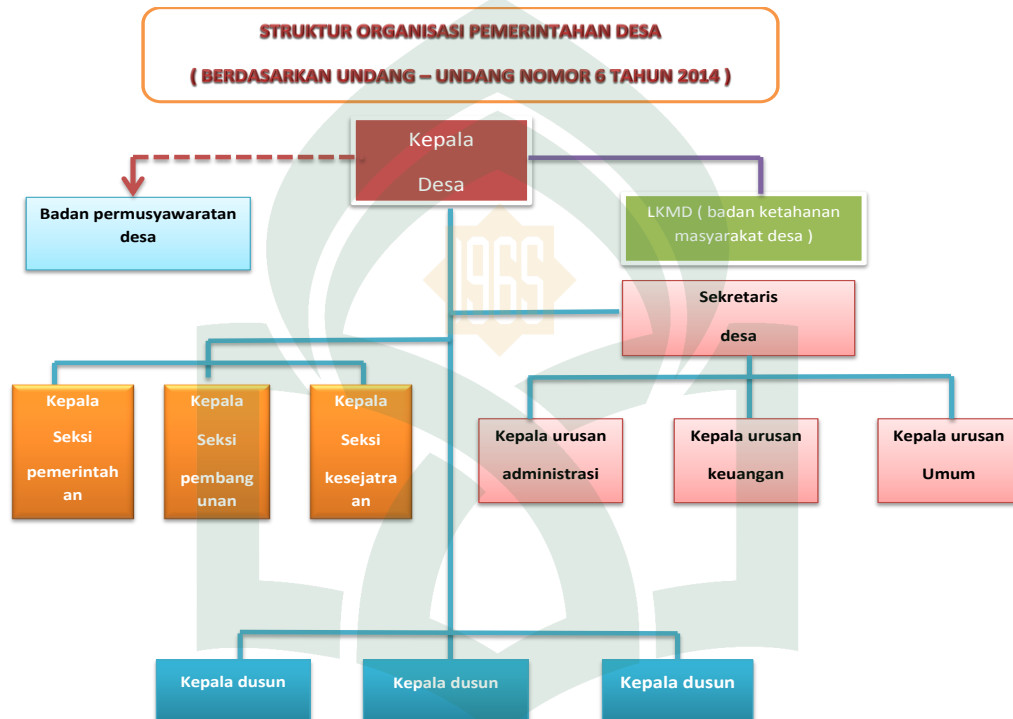
Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.



Gambar 2. Struktur desa menurut Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014⁵

Tugas dan peran aparat Desa

KEPALA DESA

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa

⁵ Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

1. memelihara kerukunan hidup warga masyarakat
2. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa
3. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
4. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
5. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat

6. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. menanamkan dan memupuk rasa perasatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, pemerintah Kabupaten Boyolali dan Negara Kesatuan republik Indonesia.
3. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
6. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. memberdayakan hak politik masyarakat desa
8. sebagai media komunikasi, informasi dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat
9. mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial yang timbul masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Pemerintah Desa, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
4. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat membantu Pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD.

Hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat Kewajiban
3. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
6. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7. Memproses pemilihan kepala desa
8. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

SEKRETARIS DESA

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
 - Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
 - Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KAUR ADMINISTRASI

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan

- Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu.

KAUR KEUANGAN

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

KEPALA URUSAN (KAUR) UMUM

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - Pengelolaan administrasi perangkat Desa

- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Penulis disini dalam memaparkan tugas kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, kepala seksi kesejatraan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pemaparan aparat desa bontotangnga mengatakan bahwa ketiga seksi ini masih belum memiliki tugas khusus dan hanya bertujuan mewujudkan desa yang mengutamakan kesejatraan masyarakatnya.

KEPALA DUSUN

Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Memperhatikan kedua gambar diatas tentang struktur organisasi desa jelas sangat berbaeda, sesuai pemaparan Kepala Desa Bontotangnga yang mengatakan bahwa betul berbeda akan tetapi perbedaan hanya pada sekretaris desa tidak berstatus PNS dan penambahan tiga kepala seksi pada struktur desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penulis menganalisi dari kedua bentuk peraturan tentang desa ini, khusus pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa adalah sebuah peraturan yang sangat mengedepankan kemandirian desa dikarenakan aparat desa berasal dari warga desa sendiri yang mempunyai kapabilitas dan profisional dalam menegrjakan tugas –

tugasnya. Berbeda pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana posisi Sekretaris desa yang Berstatus PNS.

B. Kesiapan Aparat Desa Bontotangnga dalam menerapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

Manusia adalah mahluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi juga beraksi.⁶oleh karena itu pada pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aparat desa sebagai organ negara yang menjalankan fungsi dan kewajibannya sendir⁷, sangat senang mendengar bahwa besarnya anggaran desa oleh karenanya, aparat desa sudah mempersiapkan konsep pembangunan yang akan dijalankan nantinya jika anggaran 1 miliar per desa itu dicairkan.

Beberapa jenis pembangunan Desa Bontotangng

1. Jalan Tani
2. Kantor Desa
3. Pengairan Persawahan
4. Kamar Mandi

Segi struktur kesiapan lain adalah telah terisinya kursi sekretaris desa yang bukan berstatus PNS. Disamping itu pula pada struktur desa belum sepenuhnya berjalan yakni pada ketiga kepala seksi yaitu kepala seksi kesejatraan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi pembangunan. Melihat belum waktunya pula penerapan sepenuhnya berjalan karena hingga peneliti mengadakan penelitian di Desa

⁶ Sabian Utsman Dasar-Dasar Soliologi Hukum (yogyakarta pustaka pelajar 2009)h 185

⁷ Hasn Kelsen Teori Umum Tentang Hukum dan Negara(Bandung Nusa Media 2013)h 276

Bontotangnga kondisi kegiatan kepala desa yang masih mengikuti beberapa pelatihan tentang pelaksanaan teknis penerapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pelaksanaan penelitian kondisi aparat desa baik Aparat desa dan warga desa bontotangnga yang sangat bersemangat memberikan infonya tentang objek penelitian. Melihat kesiapan aparat desa menerapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , mereka sangat siap akan hal itu. Namun tidak selamanya mendapatkan jalan yang mudah aparat desa pula kadangkala mendapat hambatan baik pada struktur desa maupun keuangan .

Struktur desa yang berubah pada Undang – Undang baru ini yakni pada sekretaris dan adanya penambahan yakni tiga kepala seksi.yang membuat penghambat disini adalah berbicara gaji ketiga kepala seksi tersebut yang pada penjelasan kepala desa belum mempunyai anggaran tersendiri di APBN dan APBD. Keuangan merupakan hal yang sangat memberikan ketidak pahaman kepala desa karena setiap bulannya format laporan pertanggung jawaban kegiatan yang berbeda dan berubah – ubah ini yang membuat kepala desa dan anggotanya kebingung dalam pelaporan keuangan.

Peneliti juga mendapatkan penjelasan tentang bentuk anggaran yang dialami Desa Bontotangnga. yakni anggaran daerah dataran rendah berbeda dengan anggaran daerah dataran tinggi, dimana daerah dataran rendah mendapatkan lebih banyak dana

dibandingkan dengan daerah dataran tinggi dan peneliti juga menganalisis bahwa letak geografis desa mempengaruhi banyaknya pengeluaran anggaran desa dalam melakukan kegiatan pembangunan. lebih miris lagi ketika melaksanakan pembangunan hanya menggunakan kuda atau tenaga manusia untuk mengangkut bahan – bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Fasilitas pula mempengaruhi kegiatan yang dilakukan aparat desa baik dari sarana prasarana pembangunan karena letak geografis desa bontotangnga yang jauh dari pusat kota. peneliti juga mendapatkan kondisi sinyal yang sangat kurang baik di desa lokasi penelitian. Melihat beberapa hambatan aparat Desa Bontotangnga memberikan kesimpulan bahwa hingga saat ini penerapannya belum mencapai 50 % dan masih sulit dipahami dari segi aturan dan penerapan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Struktur Desa yang dianut dalam Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) berbeda dengan Struktur Desa yang dianut oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Undang-Undang Pemerintah Daerah mensyaratkan Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan di Undang-Undang Desa yang baru tidak mensyaratkan sekretaris desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (NonPNS).
2. Dari hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa aparat desa disana sudah siap untuk menjalankan UU desa yang baru, sehingga fungsi struktur desa yang baru kinerjanya sangat memungkinkan untuk selalu maksimal disebabkan oleh dukungan Dana Desa didalam APBN/APBD.

B. Implikasi penelitian

1. Bahwa perlu adanya kualitas pelaksanaan Undang-Undang Desa yang memberikan kekuatan Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas di Daerah/Desa.
2. Selain Dana yang ditujukan oleh pemerintah, Sekretaris Desa harus pula meningkatkan kinerja Pendidikan dan Kesekretariatan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Achmad dan Wiwie Haryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, jakarta: kencana, 2013
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: PT Aksara, 1985.
- Amiruddin dan Zaenal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan konstitusi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa
- Basri, Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011
- Kelsen, Hasn. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media 2013
- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. jakarta kencana prenatal media, 2009
- Muda, Ahmad A.K. *kamus lengkap bahasa Indonesia*. jakarta Reality Publisher 2006

Muhammad , Ridhoni “Analisis penerapan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” [http : //edhoniedo.blogspot.co.id/2015/09/analisa-penerapan-undang-undang - nomor-6.htm l](http://edhoniedo.blogspot.co.id/2015/09/analisa-penerapan-undang-undang-nomor-6.html) (30 Nopember 2015)

Mardalis . *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Naskah Akedemik Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negar*. ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: pustaka LP3ES Indonesia, 2006

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yokyakarta, 1998

[suara gowa. blogspot. Co .id/2011/04/kabupaten-gowa-kondisi-geografis-dan. html](http://suara.gowa.blogspot.Co.id/2011/04/kabupaten-gowa-kondisi-geografis-dan.html)
(25-12-2015)

Sugiono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Tamin, Faisal. *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Balantika. 2004

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Soliologi Hukum*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2009

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Waluyo, Bambang. *Peneliti Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Akbar Rahman lahir di Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Januari 1993 anak ke Tujuh dari buah hati H. Abd. Rahman dan Hj. Marhaban. Pendidikan formal dimulai di MIN. KOLAKA dan lulus pada tahun 2005 melanjutkan ke bangku MTS.N KOLAKA lulus pada tahun 2009, setelah itu penyusun mendaftarkan dirinya ke MAN 1 KOLAKA dinyatakan lulus pada tahun 2011, tidak sampai disitu penyusun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin jurusan Ilmu Hukum dan menyelesaikan ujian meja, dinyatakan lulus dengan interfal waktu tiga tahun Sembilan bulan yakni terhitung mulai tahun 2012-2016.

Beberapa organisasi dan kegiatan yang diikuti selama menempuh pendidikan diantaranya Lomba Tingkat (Pramuka) tahun 2006 tingkat Kabupaten, Perkemahan Satuan Karya tingkat Nasional di Batam 2010, ketua OSIS MAN 1 KOLAKA, Anggota Racana Alauddin Dan Mepadeapati UIN Alauddin Makassar, Anggota HMI Komisariat Syari'ah dan Hukum, pengurus HMJ ilmu hukum, pendiri dan pengurus FOKMA (forum kajian mahasiswa).